



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

LAPORAN KEUANGAN

**TAHUNAN TAHUN 2025 AUDITED
BAGIAN ANGGARAN 005.05.403429
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN
MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2025

**JL. Pulau Bangka Komplek
Perkantoran Pemprov Bangka
Belitung**

**Kota Pangkalpinang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Telp. 0717-9111513

e-mail : info@ptun-pangkalpinang.go.id



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG 403429

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025
Audited

BAGIAN ANGGARAN 005.05
DIRJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Provinsi Bangka Belitung
Telp. 0717-9111513 PANGKALPINANG - Babel 403429
e-mail : info@ptun-pangkalpinang.go.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pangkalpinang, 31 Desember 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,


Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M.
NIP. 198112292006042015

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iii
Ringkasan.....	01
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	04
II. Neraca.....	05
III. Laporan Operasional.....	06
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	07
V. Laporan Keuangan Tertentu dan Informasi Penting Lainnya.....	08
VI. Catatan atas Laporan Keuangan.....	09
A. Penjelasan Umum.....	09
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.....	09
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	10
A.3. Basis Akuntansi.....	10
A.4. Dasar Pengukuran.....	11
A.5. Kebijakan Akuntansi.....	11
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	20
B.1. Pendapatan.....	21
B.2. Belanja.....	22
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	24
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran.....	24
C.2. Kas di Bendahara Penerimaan.....	24
C.3. Persediaan.....	24
C.4. Peralatan dan Mesin.....	25
C.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	25
C.6. Uang Muka dari KPPN.....	25
C.7. Ekuitas.....	26

D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	26
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	26
D.2.	Beban Pegawai.....	27
D.3.	Beban Persediaan.....	27
D.4.	Beban Barang dan Jasa.....	28
D.5.	Beban Pemeliharaan.....	29
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	29
D.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	30
D.8.	Kegiatan Non Operasional.....	30
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	31
E.1.	Ekuitas Awal.....	31
E.2.	Surplus (defisit) LO.....	31
E.3.	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.....	31
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	31
E.4.1.	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	32
E.4.2.	Transfer Masuk.....	32
E.5.	Ekuitas Akhir.....	32
F.	Pengungkapan Penting Lainnya.....	33
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca.....	33
F.2.	Pengungkapan Lain-lain.....	33
F.2.1	Temuan dan Tindaklanjut Temuan BPK.....	33
F.2.2	Informasi Pendaptan dan Belanja secara Akrua.....	33
F.2.3	Rekening Pemerintah.....	33
F.2.4	Revisi DIPA.....	34
F.2.5	Ralat SPM, SSBP,SSPB.....	34
F.2.6	Catatan Penting Lainnya.....	34
Lampiran-lampiran		

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Prov. BABEL. Pangkalpinang - BABEL

Telp. 0717-9111513

e-mail : info@ptun-pangkalpinang.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalpinang, 31 Desember 2025

Kuasa Pengguna Anggaran Sekretaris,



Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M.
NIP. 198112292006042015

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan instansi, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2025 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 9,568,000 ,- dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 5,251,000 ,-

Realisasi Belanja Negara pada Tahunan TA 2025 adalah sebesar Rp 53,380,000,- atau mencapai 99.99% dari alokasi anggaran sebesar Rp 53,385,000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2025 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 sebagaimana telah diubah dengan 213/PMK.05/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

233/PMK.05/2011, Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 22,905,623 ,- yang merupakan aset lancar yang terdiri dari : Persediaan sebesar Rp 22,905,623,- Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp 0 ,-

Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp. 22,905,623,-. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp. 22,905,623 ,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 9,568,000 ,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 55,951,500 ,- sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp.46,383,500,-). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus(DEFISIT) sebesar Rp.0,- sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar(Rp.46,383,500,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp. 7,573,123,- dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp.46,383,500,-). kemudian ditambah dengan Selisih Revaluasi Aset Tetap senilai Rp. 0,- ditambah Koreksi Lain-Lain senilai Rp.0,- ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 61,716,000,- dan Kenaikan/Penurunan Ekuitas Rp. 15,332,500,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp. 22,905,623,-

5. INFORMASI KEUANGAN TERTENTU DAN INFORMASI PENTING LAINNYA

Berisi informasi keuangan tertentu yang tersaji sampai dengan 31 Desember 2025 . Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi pendukung atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

I LRA

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025
Audited (dalam satuan Rupiah)

NO	Uraian	Catatan	TA 2025		
			Anggaran	Realisasi	%
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	A.1			
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	A.1.1	5,251,000	9,568,000	182.21
	Hibah	A.1.2	0	0	0
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		5,251,000	9,568,000	182.21
B.	Belanja Negara	B.2			
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	00
2.	Belanja Barang	B.2.2.	53,385,000	53,380,000	99.99
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	00
	Jumlah Belanja Negara		53,385,000	53,380,000	99.99

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II NERACA

II. Neraca

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
NERACA
Audited PER 31 Desember 2025
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan		2025	2024
ASET				
Aset Lancar	C.1			
Kas dan Bank				
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.	1.	0	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.	2.	0	0
Persediaan	C.1.	3.	22,905,623	7,573,123
Jumlah Aset Lancar			22,905,623	7,573,123
Aset Tetap	C.2			
Tanah	C.2.	1.	0	0
Peralatan dan Mesin	C.2.	2.	0	0
Gedung dan Bangunan	C.2.	3.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2.	4.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.	5.	0	(0)
Jumlah Aset Tetap			0	0
Aset Lainnya	C.4			
Aset tak Berwujud	C.4.	1.	0	0
Aset Lain-lain	C.4	2.	0	0
Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset	C.4	3.	(0)	(0)
Jumlah Aset Lainnya			0	0
Jumlah Aset			22,905,623	7,573,123
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek	C.5			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.5.	1.	0	0
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.5.	2.	0	
Uang Muka dari KPPN	C.5	3.	0	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek			0	0
Jumlah Kewajiban			0	0
EKUITAS				
Ekuitas	C.6		22,905,623	7,573,123
Jumlah Ekuitas			22,905,623	7,573,123
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas			22,905,623	7,573,123

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

III LAP. OPERASIONAL



III LAP. OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

LAPORAN OPERASIONAL

PER 31 Desember 2025

Audited (dalam satuan Rupiah)

URAIA N	Catatan	2025	2024
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	9,568,000	6,643,500
Jumlah Pendapatan		9,568,000	6,643,500
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	2,571,500	8,424,153
Beban Barang dan Jasa	D. 4	36,440,000	42,394,000
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	16,940,000	32,592,650
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 7	0	0
Jumlah Beban		55,951,500	83,410,803
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(46,383,500)	(76,767,303)
Kegiatan Non Operasional Lainnya	D. 11	0	0
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	D. 12	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(46,383,500)	(76,767,303)
Pos Luar Biasa	D. 13	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(46,383,500)	(76,767,303)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini*

IV. LAP. PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN TATA USAHA PANGKALPINANG

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PER 31 Desember 2025

Audited (dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025	2024
Ekuitas Awal	E. 1	7,573,123	1,448,500
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(46,383,500)	(76,767,303)
Ekuitas	E. 3		
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.1	0	0
Selisih Revaluasi Aset	E. 3.2	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3.3	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 3.4	0	0
Jumlah		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 4	61,716,000	82,891,926
Kenaikan/penurunan ekuitas		15,332,500	6,124,623
Ekuitas Akhir		22,905,623	7,573,123

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini*

V. Laporan Keuangan Tertentu dan Informasi Penting Lainnya

A. Laporan Keuangan Tertentu

1. Informasi Pagu dan Realisasi Anggaran s.d. 31 Desember 2025

Uraian	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
A. Pagu	0	53.385.000	0	53.385.000
B. Realisasi s.d 30 Des 2025	0	53.380.000	0	53.380.000
C. % Realisasi s.d 30 Des 2025	0	99.99%	0	99.99%

Sampai dengan 31 Desember Tahun 2025, realisasi belanja pada satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebesar Rp. 53,380.000 (99.99%).

2. Informasi Pagu Blokir

N O	Jenis Belanja	Pagu	Blokir Pagu	Rencana Buka Blokir	
				Rupiah	Tanggal
NIHIL					

Berdasarkan pada instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025. Pada tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang (403429) tidak ada pagu yang terdampak efisiensi anggaran.

B. Informasi Penting Lainnya

1. Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran Per 31 Desember 2025

Kementerian/Lembaga : Mahkamah Agung
Unit Organisasi : Badan Urusan Administrasi
Satuan Kerja : Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
Fungsi : Ketertiban dan Keamanan
Sub Fungsi : Peradilan
Program : Program Dukungan Manajemen
Lokasi : Kep. Bangka Belitung

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman II DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyesuaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	015	005	403429	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG	Nilai	100.00	100.00	92.80	0.00	100.00	99.84	100.00	88.54	90%	0.00	98.38
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	18.56	0.00	10.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		97.55				100.00				

Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 pada satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang (403429) 88.54, konversi bobot 90% dan nilai akhir 98.38 .

2. Laporan Kinerja

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Mahkamah Agung
 Unit Organisasi : Badan Urusan Administrasi
 Satuan Kerja : Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
 Fungsi : Ketertiban dan Keamanan
 Sub Fungsi : Peradilan
 Program : Program Dukungan Manajemen
 Lokasi : Kep. Bangka Belitung

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
005.05.BF.1059. AEA.002	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara/ Koordinasi	2,885,000	2.880,000	99.83	1	1	Kegiatan	100	
005.05.BF.1059. QBA.001	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara/ Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	33,000,000	33,000,000	100	96	119	Orang	100	
005.05.BF.1059. QCA.002	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara/ Perkara Hukum Perseorangan	17,500,000	17.500.000	100	2	2	Perkara	100	
	Sub Total	53.385.000	53.380.000						
	Penyesuaian	0							
	Total	53.385.000							

3. Hal Khusus Program Prioritas Nasional

Terdapat Rincian Output Prioritas Nasional Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yaitu RO Perkara sidang diluar gedung pengadilan di Lingkungan Tata Usaha Negara, dengan rincian realisasi anggaran dna capaian output sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut :

No	Kode RO Strategis	Uraian RO	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian RO
2	1059.QCA.002	Perkara sidang diluar gedung pengadilan di Lingkungan Tata Usaha Negara	17.500.000	17.500.000	100%	2 Perkara	2 Perkara	100%

B. Informasi Penting Lainnya

1. Indikator Pelaksanaan Anggaran

Indikator Pelaksanaan Anggaran Per 31 Desember 2025

Kementerian/Lembaga : Mahkamah Agung
Unit Organisasi : Badan Urusan Administrasi
Satuan Kerja : Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
Fungsi : Ketertiban dan Keamanan
Sub Fungsi : Peradilan
Program : Program Dukungan Manajemen
Lokasi : Kep. Bangka Belitung

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Urutan Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman II DIPA	Penyerapan Anggaran	Bekas Kontraktual	Penyesuaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	015	005	403429	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG	Nilai	100.00	100.00	92.80	0.00	100.00	99.84	100.00	88.54	90%	0.00	98.38
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	18.56	0.00	10.00	9.98	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		97.55				100.00				

Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran sampai dengan 31 Desember 2025 pada satuan kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang (403429) 88.54, konversi bobot 90% dan nilai akhir 98.38 .

2. Laporan Kinerja

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA TAHUN 2025

Kementerian/Lembaga : Mahkamah Agung
 Unit Organisasi : Badan Urusan Administrasi
 Satuan Kerja : Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
 Fungsi : Ketertiban dan Keamanan
 Sub Fungsi : Peradilan
 Program : Program Dukungan Manajemen
 Lokasi : Kep. Bangka Belitung

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
005.05.BF.1059. AEA.002	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara/ Koordinasi	2,885,000	2.880,000	99.83	1	1	Kegiatan	100	
005.05.BF.1059. QBA.001	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara/ Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	33,000,000	33,000,000	100	96	119	Orang	100	
005.05.BF.1059. QCA.002	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara/ Perkara Hukum Perseorangan	17,500,000	17.500.000	100	2	2	Perkara	100	
	Sub Total	53.385.000	53.380.000						
	Penyesuaian	0							
	Total	53.385.000							

3. Hal Khusus Program Prioritas Nasional

Terdapat Rincian Output Prioritas Nasional Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yaitu RO Perkara sidang diluar gedung pengadilan di Lingkungan Tata Usaha Negara, dengan rincian realisasi anggaran dna capaian output sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut :

No	Kode RO Strategis	Uraian RO	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	Persentase Penyerapan	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian RO
2	1059.QCA.002	Perkara sidang diluar gedung pengadilan di Lingkungan Tata Usaha Negara	17.500.000	17.500.000	100%	2 Perkara	2 Perkara	100%

VI Catatan Atas Laporan Keuangan

VI. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang didirikan sebagai salah satu upaya untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi para pencari keadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang terletak di Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pangkalpinang.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelesaian perkara.
2. Peningkatan Aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatkan kualitas pengawasan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu Rangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Modul Aset Tetap dan Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) Aplikasi SAKTI. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Modul Aset Tetap SAKTI adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat

- jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi

aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi
apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan

yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga

perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (*dua puluh lima jutarupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementrian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan, Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2020. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian

berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek selain Tanah.

- Nilai asset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai asset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun apabila nilai asset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Asset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang semakin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Asset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai

residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Anggaran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, asset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. KM.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa asset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah mengadakan 6 (enam) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal yaitu :

1. Revisi I tanggal 21 Februari 2025 berupa Revisi Hal. III DIPA Terkait Rencana Penarikan Dana Triwulan I (Januari-Maret) dan Revisi Efisiensi Anggaran TA 2025.
2. Revisi II tanggal 20 Maret 2025 berupa Revisi Buka Blokir Efisiensi Anggaran TA 2025.
3. Revisi III tanggal 21 April 2025 tentang Revisi Hal. III DIPA terkait rencana penarikan dana Triwulan II (April-Juni) dan Pemutakhiran POK.
4. Revisi IV tanggal 13 Juli 2025 tentang Revisi Hal. III DIPA terkait rencana penarikan dana Triwulan III (Juli-September) dan Pemutakhiran POK.
5. Revisi V tanggal 12 September 2025 tentang Revisi Hal. III DIPA terkait rencana penarikan dana Triwulan IV (Oktober-Desember) dan Pemutakhiran POK.
6. Revisi VI tanggal 15 Oktober 2025 berupa Revisi DJA Pengalihan PAGU Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo).

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

No.	Uraian	2025		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	% Real Angg.
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan	470,000	950,000	202.13
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	1,410,000	2,580,000	182.98
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	3,371,000	6,038,000	179.12
4.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	
		5,251,000	9,568,000	182.21

B.1. Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan Rp.
9,568,000*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir dari pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 9,568,000 ,-. Pendapatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah dari Pendapatan Uang Meja (Leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan, Pendapatan Ongkos Perkara, Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP

URAIAN	2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	5,251,000	5,251,000
Jumlah Pendapatan	5,251,000	5,251,000
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	53,385,000	53,385,000
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	53,385,000	53,385,000

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja Negara
: Rp. 53,380,000

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 53,380,000 atau sebesar 99,99 % dari anggaran senilai Rp. 53,385,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember TA 2025 adalah sebagai berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2025

Uraian	2025		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	53,385,000	53,380,000	99,99
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Bruto	53,385,000	53,380,000	99,99
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	53,385,000	53,380,000	99,99

Dibandingkan dengan realisasi 31 Desember TA 2024 senilai Rp 74,986,650 dari total Pagu Rp 77,250,000- atau senilai 97.07 %, Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2025 mengalami kenaikan penyerapan anggaran belanja barang yaitu sebesar 2,92%.

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp. 0*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per 31 Desember TA 2025 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja Barang
: Rp.53,380,000*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Per 31 Desember TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 53,380,000 dan Rp.74,986,650. Ada penurunan anggaran jika dibandingkan dengan TA yang lalu. Namun untuk persentase penyerapan mengalami kenaikan sebesar 2.92%.

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp. 0,-

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember TA 2025 adalah sebesar Rp. 0,- kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember TA 2025

Uraian	TA 2025
Uang Tunai di Brankas	0
Uang di Bank	0
Kuitansi yang belum di SPM GUKan	0
Selisih Pembulatan	0
Jumlah	0

Kas di
Bendahara
Penerimaan :
Rp. 0

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember TA 2025

Uraian	TA 2025
Uang Tunai di Rekening RPL	0
Kuitansi yang belum di SPM GUKan	0
Selisih Pembulatan	0
Jumlah	0

C.3. Persediaan

Persediaan :
Rp. 22,905,623

Persediaan per 31 Desember TA 2025 adalah sebesar Rp. 22,905,623,- Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan

untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Jumlah Sesuai dengan berita acara stock opname fisik.

C.4. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin : Rp. 0

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 adalah Rp. 0 Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp.
(0)

Saldo Awal	0
Mutasi Tambah	0
Reklasifikasi Masuk	0
Pembelian	0
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Keluar	0
Saldo per 31 Desember 2025	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025	(0)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	0

C.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 Rp (0). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat asset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Uang Muka dari
KPPN:
Rp.0

C.6. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0,- . Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.7. Ekuitas

Ekuitas:
Rp.22,905,623

Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 22,905,623,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan
PNBP:
Rp.9,568,000

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 Rp. 9,568,000 Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2025

No.	Uraian	2025		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	% Real Angg.
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan	470.000	950.000	202.13
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	1,410,000	2,580.000	182.98
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	3,371,000	6,038,000	179.12
4.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	
		5,251,000	9,568,000	182.21

D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai
: Rp. 0*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp.0 Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2025

Uraian	TA 2025
Beban Gaji Pokok PNS	0
Beban Pembulatan Gaji PNS	0
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0
Beban Tunj. Anak PNS	0
Beban Tunj. Struktural PNS	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	0
Beban Tunj. PPh PNS	0
Beban Tunj. Beras PNS	0
Beban Uang Makan PNS	0
Beban Tunjangan Umum PNS	0
Total Beban Pegawai	0

D.3. Beban Persediaan

*Beban Persediaan :
Rp. 2,571,500*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp. 2,571,500,- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2025

Uraian	TA 2025
Beban Persediaan Konsumsi	2,571,500
Total Beban Persediaan	2,571,500

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa :*

Rp.36,440,000

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember TA 2025 sebesar Rp. 36,440,000.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban bahan dan beban jasa konsultan.

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember TA 2025

Uraian	TA 2025
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0
Beban Bahan	7,080,000
Beban Jasa Konsultan	28,800,000
Beban Jasa Lainnya	560,000
Total Beban Barang dan Jasa	36,440,000

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan: Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 0.
Rp. 0

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2025

Uraian	TA 2025
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0
Total Beban Pemeliharaan	0

D.6. Beban Perjalanan Dinas

**Beban Perjalanan
Dinas :** Rp.
16,940,000

Beban Perjalanan Dinas untuk TA 2025 sebesar Rp. 16,940,000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2025

Uraian	TA 2025
Beban Perjalanan Biasa	16,940,000
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting	0
Total Beban Perjalanan Dinas	16,940,000

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp.0

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember TA 2025 sebesar Rp 0. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember TA 2025

Uraian	TA 2025
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
Beban Amortisasi Software	0
Beban Penyusutan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	0

D.8. Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional : Rp. 0

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2025

Uraian	TA 2025
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Jumlah Surplus (defisit) Kegiatan Non Operasional	0
Surplus (defisit) Kegiatan Non Operasional	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp 7,573,123,-
Rp. 7,573,123

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(defisit) LO : (Rp46,383,500) Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2025 adalah sebesar (Rp.46,383,500). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi: Rp. 0 Koreksi Nilai Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Koreksi Antar Entitas : Rp61,716,000,- Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.61,716,000,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	53,380,000
Diterima Dari Entitas Lain	(9,568,000)
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	17,904,000
Pengesahan Hibah Langsung	0
Jumlah	61,716,000

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025 , DDEL sebesar Rp. (9,568,000) sedangkan DKEL sebesar Rp 53,380,000,-

E. 4.2 Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan penerimaan dari entitas pelaporan lain. Pada periode hingga 31 Desember 2025, nilai transfer masuk sebesar Rp. 17,904,000

E.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp. 22,905,623,-
: Rp. 22,905,623,-

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK baik di Tahun Anggaran 2025 maupun Tahun Anggaran sebelumnya.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Informasi pendapatan dan belanja secara akrual akan dijelaskan pada laporan keuangan Tahunan Tahun 2025.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah :

1. BRI Cab. Pangkalpinang A/C 653244019681000 a.n. BPG 015 PTUN PKP yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp.0.
2. Bank BRI Cabang Pangkalpinang A/C 651554034291000 a.n. BPG 015 PTUN PKP 403429 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILMILTUN dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp.0.
3. Bank BRI Cabang Pangkalpinang A/C 0063-01-002185-30-7 a.n. RPL 015 PDT PTUN PKP UTK BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp.6,428,920,-

F.2.4. Revisi DIPA

Pada periode Laporan Keuangan Tahunan 2025 terdapat 3 (tiga) Revisi DIPA yaitu :

1. **Revisi I** tanggal 21 Februari 2025 berupa Revisi Hal. III DIPA Terkait Rencana Penarikan Dana Triwulan I (Januari-Maret) dan Revisi Efisiensi Anggaran TA 2025.
2. **Revisi II** tanggal 20 Maret 2025 berupa Revisi Buka Blokir Efisiensi Anggaran TA 2025.
3. **Revisi III** tanggal 21 April 2025 tentang Revisi Hal. III DIPA terkait rencana penarikan dana Triwulan II (April-Juni) dan Pemutakhiran POK.
4. **Revisi IV** tanggal 13 Juli 2025 tentang Revisi Hal. III DIPA terkait rencana penarikan dana Triwulan III (Juli-September) dan Pemutakhiran POK.
5. **Revisi V** tanggal 12 September 2025 tentang Revisi Hal. III DIPA terkait rencana penarikan dana Triwulan IV (Oktober-Desember) dan Pemutakhiran POK.
6. **Revisi VI** tanggal 15 Oktober 2025 berupa Revisi DJA Pengalihan PAGU Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo).

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Pada periode Laporan Keuangan Tahunan 2025 tidak terdapat ralat SPM, SSBP, maupun SSPB.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Prioritas nasional VII - Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Pelaksanaannya diantaranya melalui 2 (dua) rincian output yaitu ;

1. Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan TUN
2. Perkara sidang diluar gedung pengadilan di Lingkungan TUN

Lampiran-lampiran

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 07/05/26 7:30 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 3:24 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	22,905,623	7,573,123	15,332,500	202.46
JUMLAH ASET LANCAR	22,905,623	7,573,123	15,332,500	202.46
JUMLAH ASET	22,905,623	7,573,123	15,332,500	202.46

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	22,905,623	7,573,123	15,332,500	202.46
JUMLAH EKUITAS	22,905,623	7,573,123	15,332,500	202.46
JUMLAH EKUITAS	22,905,623	7,573,123	15,332,500	202.46
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	22,905,623	7,573,123	15,332,500	202.46

Keterangan :

FINAL

Pangkalpinang, 7 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

DORA NATALIA SINGARIMBUN

NIP 198112292006042015

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005

MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : 05

Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha

WILAYAH/PROVINSI : 3000

BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : 403429

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl. Cetak 07/05/2026 3:25 PM

lap_neraca_percobaan_sawal_akruai_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	7,573,123	0
0.0	391111	Ekuitas	0	7,573,123
JUMLAH			7,573,123	7,573,123

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL
PINANG

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 3:24 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	53,380,000
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	9,568,000	0
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	950,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	2,580,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	6,036,000
3.0	521211	Belanja Bahan	7,080,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	28,800,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	560,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	16,940,000	0
JUMLAH			62,948,000	62,948,000

Keterangan :

FINAL

Pangkalpinang, 7 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

DORA NATALIA SINGARIMBUN
198112292006042015

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL
 PINANG

Tgl Data : 07/05/26 7:30 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 3:24 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	22,905,623	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	53,380,000
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	9,568,000	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	17,904,000
0.0	391111	Ekuitas	0	7,573,123
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	950,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	2,580,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	6,038,000
3.0	521211	Beban Bahan	7,080,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	28,800,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	560,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	16,940,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	2,571,500	0
JUMLAH			88,425,123	88,425,123

Keterangan :

FINAL

Pangkalpinang, 7 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

DORA NATALIA SINGARIMBUN

NIP 198112292006042015



DAFTAR JURNAL BMN DAN PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

Kode Lap : CALK.BMN
Tanggal : 07/05/26 3:26 PM
Prg ID : calk_bmn_satker_poc

117111 Barang Konsumsi

KDSATKER	JNSDOK1	TRN_BMN			RPHREAL
005.05.403429	406 JRNBMN	K01	Habis Pakai	(2,571,500)	
005.05.403429	406 JRNBMN	M03	Transfer Masuk	17,904,000	
005.05.403429	999 SAWAL	999	Saldo Awal	7,573,123	
TOTAL					22,905,623

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 07/05/26 7:30 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 3:24 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	9,568,000	6,643,500	2,924,500	44.02
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	9,568,000	6,643,500	2,924,500	44.02
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	9,568,000	6,643,500	2,924,500	44.02
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	2,571,500	8,424,153	(5,852,653)	(69.475)
Beban Barang dan Jasa	36,440,000	42,394,000	(5,954,000)	(14.044)
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	16,940,000	32,592,650	(15,652,650)	(48.025)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 07/05/26 7:30 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 3:24 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	55,951,500	83,410,803	(27,459,303)	(32.921)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(46,383,500)	(76,767,303)	30,383,803	(39.579)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(46,383,500)	(76,767,303)	30,383,803	(39.579)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(46,383,500)	(76,767,303)	30,383,803	(39.579)

Keterangan :
FINAL

Pangkalpinang, 7 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



DORA NATALIA SINGARIMBUN
NIP 198112292006042015

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005

ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) 05

SATUAN KERJA : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG 403429

Tgl Data : 07/05/26 7:30 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 3:24 PM

Halaman : 1

lap_fra_face_salker_new_poc

URAIAN	2025					2024		
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	5,251,000	9,568,000	4,317,000	182	6,972,000	6,643,500	328,500	95
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	5,251,000	9,568,000	4,317,000	182	6,972,000	6,643,500	328,500	95
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	5,251,000	9,568,000	4,317,000	182	6,972,000	6,643,500	328,500	95
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	53,385,000	53,380,000	(5,000)	100	77,250,000	74,986,650	2,263,350	97
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	53,385,000	53,380,000	(5,000)	100	77,250,000	74,986,650	2,263,350	97
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA

: MAHKAMAH AGUNG 005

ESELON I

: Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) 05

SATUAN KERJA

: PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG 403429

Tgl Data : 07/05/26 7:30 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 3:24 PM

Halaman : 2

lap_jra_face_salker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	53,385,000	53,380,000	(5,000)	100	77,250,000	74,986,650	2,263,350	97
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Pangkalpinang, 7 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

DORA NATALIA SINGARIMBUN

NIP 198112292006042015

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 3000
SATUAN KERJA : 403429
JENIS SATUAN KERJA : KD

MAHKAMAH AGUNG
Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
BANGKA BELITUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/26 3:25 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_saker_poc
Tgl Data : 7/5/26 8:04 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	180,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	180,000	0	0	0	0		0
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	6,905,000	7,085,000	7,080,000	0	7,080,000	99.93	5,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	6,905,000	7,085,000	7,080,000	0	7,080,000	99.93	5,000
5221	Belanja Jasa							
522131	Belanja Jasa Konsultan	28,800,000	28,800,000	28,800,000	0	28,800,000	100	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	300,000	560,000	560,000	0	560,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	29,100,000	29,360,000	29,360,000	0	29,360,000	100	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17,200,000	16,940,000	16,940,000	0	16,940,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	17,200,000	16,940,000	16,940,000	0	16,940,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	53,385,000	53,385,000	53,380,000	0	53,380,000	99.99	5,000
	JUMLAH BELANJA	53,385,000	53,385,000	53,380,000	0	53,380,000	99.99	5,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA

: 005
: 05
: 3000
: 403429

MAHKAMAH AGUNG
Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
BANGKA BELITUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Kode Lap : LRA,PE1.1
Tanggal : 07/05/26 3:25 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	470,000	950,000	0	950,000	202.13
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	1,410,000	2,580,000	0	2,580,000	182.98
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	3,371,000	6,038,000	0	6,038,000	179.12
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya					
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	5,251,000	9,568,000	0	9,568,000	182.21
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	5,251,000	9,568,000	0	9,568,000	182.21
	JUMLAH PENDAPATAN	5,251,000	9,568,000	0	9,568,000	182.21

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
ESELON I : 05
WILAYAH/PROVINSI : 3000
SATUAN KERJA : 403429
JENIS SATUAN KERJA : KD

MAHKAMAH AGUNG
Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
BANGKA BELITUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/26 3:25 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 7/5/26 8:04 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	180,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	180,000	0	0	0	0		0
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	6,905,000	7,085,000	7,080,000	0	7,080,000	99.93	5,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	6,905,000	7,085,000	7,080,000	0	7,080,000	99.93	5,000
5221	Belanja Jasa							
522131	Belanja Jasa Konsultan	28,800,000	28,800,000	28,800,000	0	28,800,000	100	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	300,000	560,000	560,000	0	560,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	29,100,000	29,360,000	29,360,000	0	29,360,000	100	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17,200,000	16,940,000	16,940,000	0	16,940,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	17,200,000	16,940,000	16,940,000	0	16,940,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	53,385,000	53,385,000	53,380,000	0	53,380,000	99.99	5,000
	JUMLAH BELANJA	53,385,000	53,385,000	53,380,000	0	53,380,000	99.99	5,000

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL
PINANG

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 07/05/26 3:24 PM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	7,573,123	1,448,500	6,124,623	422.83
SURPLUS/DEFISIT-LO	(46,383,500)	(76,767,303)	30,383,803	(39.58)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	61,716,000	82,891,926	(21,175,926)	(25.55)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	15,332,500	6,124,623	9,207,877	150.34
EKUITAS AKHIR	22,905,623	7,573,123	15,332,500	202.46

Keterangan :
FINAL

Pangkalpinang, 7 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



DORA NATALIA SINGARIMBUN
NIP 198112292006042015

RINCIAN TRANSAKSI ANTAR ENTITAS TINGKAT SATKER MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2025

catik_lpo_akun_satker_poc

Akun	Uraian	2025	2024
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	53,380,000	74,986,650
313121	Diterima dari Entitas Lain	-9,568,000	-6,643,500
313221	Transfer Masuk	17,904,000	14,548,776
JUMLAH		61,716,000	82,891,926

**RINCIAN KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS TINGKAT SATKER MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2025**

calc_lpe_akun_satker_poc

Akun	Uraian	2025	2024
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	53,380,000	74,986,650
313121	Diterima dari Entitas Lain	-9,568,000	-6,643,500
313221	Transfer Masuk	17,904,000	14,548,776
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	950,000	730,000
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	950,000	730,000
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	2,580,000	1,360,000
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	2,580,000	1,360,000
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	6,038,000	4,553,500
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	6,038,000	4,553,500
522131	Beban Jasa Konsultan	-28,800,000	-28,800,000
522131	Pengembalian Beban Jasa Konsultan	-28,800,000	-28,800,000
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	-16,940,000	-32,592,650
524111	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa	-16,940,000	-32,592,650
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0
524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0
522191	Beban Jasa Lainnya	-560,000	-300,000
522191	Pengembalian Beban Jasa Lainnya	-560,000	-300,000
521211	Beban Bahan	-7,080,000	-13,265,000
521211	Pengembalian Beban Bahan	-7,080,000	-13,265,000
593111	Beban Persediaan konsumsi	-2,571,500	-8,424,153
593111	Pengembalian Beban Persediaan konsumsi	-2,571,500	-8,424,153
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	0
593113	Pengembalian Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	0
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	-29,000
521114	Pengembalian Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	-29,000
null	null	0	0
JUMLAH		-31,051,000	-70,642,680

**RINCIAN SURPLUS/DEFISIT-LO TINGKAT SATKER MENURUT AKUN
SAMPAI DENGAN DESEMBER 2025**

calc_lpe_akun_satker_poc

Akun	Uraian	2025	2024
391112	Surplus/Defisit-LO	0	0
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	950,000	730,000
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	950,000	730,000
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	2,580,000	1,360,000
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	2,580,000	1,360,000
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	6,038,000	4,553,500
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	6,038,000	4,553,500
522131	Beban Jasa Konsultan	-28,800,000	-28,800,000
522131	Pengembalian Beban Jasa Konsultan	-28,800,000	-28,800,000
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	-16,940,000	-32,592,650
524111	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa	-16,940,000	-32,592,650
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0
524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0
522191	Beban Jasa Lainnya	-560,000	-300,000
522191	Pengembalian Beban Jasa Lainnya	-560,000	-300,000
521211	Beban Bahan	-7,080,000	-13,265,000
521211	Pengembalian Beban Bahan	-7,080,000	-13,265,000
593111	Beban Persediaan konsumsi	-2,571,500	-8,424,153
593111	Pengembalian Beban Persediaan konsumsi	-2,571,500	-8,424,153
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	0
593113	Pengembalian Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	0
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	-29,000
521114	Pengembalian Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	-29,000
JUMLAH		-92,767,000	-153,534,606